

Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023

Syahrir Rahman*

Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung,
Bandung, Indonesia

Corresponding Email: syahrirrahman@gmail.com

Abstract

The Village Fund (VF), also known as Dana Desa, is a fiscal decentralization instrument intended to catalyze the development of villages in Indonesia. This paper examines the influence of the Village Fund on the Village Development Index (Indeks Desa Membangun, IDM) in West Java Province from 2018 to 2023. Using linear regression analysis, the research reveals a robust relationship between Village Fund disbursement and Village Development Index growth. The findings indicate that an increase in Village Fund will lead to a substantial rise in the Village Development Index in the following year. The findings support the notion that productive utilization of Village Fund, particularly in infrastructure projects through the Cash for Work Village Program, could contribute to economic growth and community welfare.

Keywords: Rural Development, Village Funds, Village Development Index, and Simple Linear Regression.

JEL Classification: H50 and R50.

 <https://doi.org/10.14710/jdep.7.3.173-180>



[This is an open-access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

Pendahuluan

Pemerataan pembangunan adalah salah satu misi dalam pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025. Misi tersebut di antaranya bermaksud untuk memperkuat proses pembangunan di tingkat daerah, mengurangi disparitas sosial yang ada, dan menjamin tersedianya akses terhadap pelayanan dan fasilitas ekonomi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat (UU Nomor 17 Tahun 2007). Komitmen pemerintah dalam mewujudkan hal ini salah satunya dilaksanakan melalui penetapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi pada lahirnya Dana Desa. Dana Desa (DD) merupakan komponen alokasi dalam skema Transfer ke Daerah (transfer to regions) yang disediakan khusus bagi Desa. Penyaluran Dana Desa bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. DD termasuk dalam salah satu skenario desentralisasi fiskal yang ditujukan langsung kepada pemerintah pada level desa dengan harapan dapat mendorong terjadinya pembangunan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat di desa.

*Corresponding Author: Syahrir Rahman, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, Jl. B, Lb. Siliwangi, Coblong, Bandung, Indonesia, syahrirrahman@gmail.com

Penetapan UU Desa telah mendorong terjadinya perubahan paradigma pembangunan desa di mana desa diposisikan sebagai subjek pembangunan sehingga mendapatkan hak untuk mengatur perencanaan pembangunannya sendiri yang salah satunya diwujudkan melalui Musyawarah Desa. Perubahan paradigma ini juga dikenal sebagai pergeseran konsep “membangun desa” menjadi “desa membangun” (Fazri et al., 2022). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengoperasionalkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai dasar untuk mengkategorikan status tingkat kemajuan pembangunan dan kemandirian desa melalui tiga komponen yang terdiri dari ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi desa. Indeks ini digunakan sebagai dasar target-target pembangunan nasional terkait pembangunan perdesaan. IDM diharapkan dapat memberikan gambaran perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dari DD. Namun, penelitian terkait yang membuktikan konsep tersebut masih cukup terbatas. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara DD dan IDM (Dewi, 2021; Arina et al., 2021) di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan hubungan dan pengaruh yang signifikan.

Akan tetapi, penelitian terkait desentralisasi fiskal di Indonesia menemukan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi belum dapat ditentukan secara pasti karena adanya perbedaan pengelolaan dana di masing-masing wilayah (Nurhemi & Suryani R., 2015). Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi yang menerima DD cukup besar (8,2% dari total DD tahun 2016 – 2022), memerlukan penelitian terkait pengaruh DD yang selama ini berjalan agar dapat menjadi bahan evaluasi atas penyaluran DD yang telah berlangsung selama delapan tahun terakhir. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh DD terhadap perkembangan IDM di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 sehingga dapat menjadi masukan penyusunan kebijakan ke depannya terkait penyaluran DD di Provinsi Jawa Barat.

Tinjauan Pustaka

Dana Desa merupakan salah satu bentuk penerapan desentralisasi fiskal melalui transfer dana ke daerah pada level desa yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu tujuan dari desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi disparitas antarwilayah dan memastikan terselenggaranya pelayanan dasar publik di setiap daerah dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Argumen ini didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan tidak akan dapat tercapai dengan hanya mengandalkan mekanisme pasar, akan tetapi memerlukan peran pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, salah satunya melalui kebijakan anggarannya (Nurhemi & Suryani, 2015). Siburian (2022) menyatakan bahwa terdapat bukti kuat bahwa penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia pada tahun 2001 s.d. 2018 berkontribusi secara nyata terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Namun, studi yang dilakukan Nurhemi dan Suryani (2015) yang membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia pada masa sebelum desentralisasi fiskal (1990–2000) dan setelah desentralisasi fiskal (2001–2011) menemukan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak konsisten, atau tidak dapat dipastikan karena dampaknya di beberapa daerah berbeda-beda. Studi yang dilakukan oleh Swastyardi (2008) juga menunjukkan bahwa terdapat fenomena yang berbeda-beda pada tingkat ketimpangan di berbagai wilayah di Indonesia setelah

penerapan desentralisasi fiskal pada tahun 2001 – 2006. Beberapa wilayah seperti Sumatera, Jawa, dan Bali mengalami penurunan ketimpangan, sementara beberapa wilayah lainnya mengalami peningkatan ketimpangan seperti Kalimantan dan Sulawesi.

Dana Desa merupakan satu-satunya dari berbagai jenis transfer ke daerah di Indonesia yang langsung ditujukan ke desa. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa juga memiliki wewenang untuk menentukan arah pembangunannya. Oleh karena itu, pemanfaatan DD dapat ditentukan oleh Pemerintah Desa bersama-sama dengan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa. Hal ini dilakukan untuk mendorong terbentuknya kemandirian dan berjalannya proses demokrasi di desa. Proses demokrasi yang berlangsung pada tingkat desa yang didukung oleh akses ke sumber daya keuangan yang mencukupi akan mampu mendorong lebih banyak alternatif terhadap pembangunan desa (Kallert et al., 2021). Penyaluran DD telah memungkinkan desa untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kegiatan ekonomi pada tingkat lokal (Nugroho et al., 2022), akan tetapi pengaruhnya terhadap PDRB regional diketahui belum signifikan (Fazri et al., 2022). Namun, laporan lainnya juga menemukan bahwa investasi dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perdesaan diketahui dapat mendorong produktivitas perdesaan hingga membuka lapangan pekerjaan yang akan berkontribusi pada penurunan kemiskinan di perdesaan secara umum (Ali & Pernia, 2003).

Realisasi DD sampai dengan Oktober 2023 berdasarkan data dari Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA) Kementerian Keuangan RI telah mencapai Rp499.886.197.561.807 atau hampir Rp500 triliun. Nilai transfer yang mencapai sekitar Rp1 miliar per desa per tahun menjadikan skema transfer DD sebagai salah satu transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah yang terbesar di dunia (Hartojo et al., 2022). Beberapa penelitian telah mengidentifikasi hubungan dan pengaruh yang positif antara DD dan tingkat pembangunan di desa. Hartojo et al., (2022) menemukan bahwa terdapat peningkatan aktivitas ekonomi melalui nighttime light dataset di daerah perdesaan Indonesia sejak diterapkannya DD. Sejalan dengan hasil tersebut, Fazri et al., (2022) juga menemukan bahwa DD memiliki dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi perdesaan serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Peningkatan aktivitas ekonomi yang disebabkan adanya dukungan pemerintah melalui DD diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Hal ini didukung oleh penelitian Widyastuti & Nusantara (2022) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan ketika aktivitas ekonomi yang berlangsung dilakukan secara padat karya. Hal ini sejalan dengan skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang digalakkan dalam pemanfaatan DD. Padat karya tunai merupakan sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, terutama bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, yang bersifat produktif dengan menekankan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal sebagai upaya untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui skema ini, diharapkan pemberian upah kepada tenaga kerja lokal dapat menunjang pendapatan dan daya beli masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di desa.

Metode Penelitian

Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa realisasi Dana Desa di Provinsi Jawa Barat dalam bentuk time series dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dan data Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Data-data tersebut diperoleh dari website milik Pemerintah Republik Indonesia, yaitu laman Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diakses pada <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada/> untuk data realisasi Dana Desa dan publikasi elektronik Kemendesa PDTT mengenai capaian Indeks Desa Membangun yang dapat diakses melalui <https://idm.kemendesa.go.id>.

Tabel 1. Pagu dan Realisasi Dana Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 s.d. 2022

Tahun	Pagu	Realisasi
2017	Rp4.547.513.298.769	Rp4.546.634.195.493
2018	Rp4.547.513.838.000	Rp4.787.681.165.462
2019	Rp5.710.076.611.000	Rp5.704.709.833.870
2020	Rp5.882.810.121.000	Rp5.881.509.472.841
2021	Rp5.881.509.472.841	Rp5.990.622.942.000
2022	Rp6.131.237.698.000	Rp6.124.995.116.207

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2023

Tabel 2. Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 s.d. 2023

Tahun	Indeks Desa Membangun	Kategori
2018	0,6439	Berkembang
2019	0,6764	Berkembang
2020	0,6967	Berkembang
2021	0,7202	Maju
2022	0,7529	Maju
2023	0,7798	Maju

Sumber: Kemendesa PDTT RI, 2018-2023

Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DD terhadap IDM Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode analisis regresi linier. Analisis regresi linier merupakan metode statistik yang digunakan untuk melakukan estimasi mengenai hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen secara kuantitatif. Karena tulisan ini menggunakan dua variabel, yaitu IDM sebagai variabel dependen (Y) dan DD sebagai variabel independen (X), maka analisis regresi linier yang digunakan pada penulisan ini termasuk dalam Analisis Regresi Linier Sederhana. Penelitian ini menggunakan data time-series di mana pengaruh DD sebagai variabel independen diasumsikan akan dapat tercermin pada IDM pada tahun berikutnya, maka persamaan sederhana yang digunakan dalam tulisan ini adalah:

$$IDM_n = a + b(DD_{n-1}) \quad (1)$$

Secara statistik, analisis ini akan menggunakan alfa sebesar 5%. Analisis dan pengambilan kesimpulan akan dilakukan melalui nilai korelasi, determinasi, dan uji

signifikansi statistik. Sebagai data time-series, akan dilakukan uji Durbin-Watson sebagai salah satu uji klasik untuk data time-series pada analisis regresi.

Hasil dan Diskusi

Hasil

Setelah melalui Analisis Uji Regresi Linier Sederhana, ringkasan model pengaruh dari DD sebagai variabel independen terhadap IDM sebagai variabel dependen dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Ringkasan Model Analisis Regresi Linier Sederhana

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,914490029
R Square	0,836292014
Adjusted R Square	0,795365017
Standard Error	0,022595864
Observations	6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai R sebesar 0,91 yang dapat dimaknai bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara realisasi DD dengan IDM Provinsi Jawa Barat tahun 2018 s.d. 2023. Selain itu, berdasarkan nilai R Square atau koefisien determinasi, dapat diketahui bahwa DD mampu menjelaskan 0,83 atau 83% dari IDM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 s.d. 2023. Nilai Standard Error yang cukup rendah juga dapat dimaknai bahwa model ini memiliki tingkat kesalahan sebesar 0,022 atau 2%.

Tabel 4. ANOVA Analisis Regresi Linier Sederhana

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>	<i>DW</i>
Regression	1	0,0104329	0,0104329	20,433749	0,010655	1,5379764
Residual	4	0,0020422	0,0005105			
Total	5	0,0124752				

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil analisis sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Significance F berada pada angka 0,01 yang lebih kecil daripada alpha yang telah ditetapkan, sehingga dapat dimaknai bahwa variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen. Berdasarkan Uji F, diketahui $F_{hitung} (20,4) > F_{tabel} (7,71)$, sehingga dapat dimaknai bahwa persamaan ini dapat digunakan sebagai alat prediksi dan estimasi secara statistik. Hasil Uji Durbin-Watson juga menunjukkan nilai uji $>$ nilai ambang, sehingga tidak ditemukan masalah autokorelasi pada data ini.

Tabel 5. Tabel Koefisien dan Uji T

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	0,335145	0,0837999	3,9993539	0,016138
Dana Desa (n-1) (triliun rupiah)	0,068389	0,0151291	4,5203705	0,010655

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 5 menunjukkan hasil analisis berupa nilai koefisien, t hitung, dan P-value. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai P-value sebesar $0,01 < 0,05$, sehingga dapat dimaknai bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara DD dan IDM. Nilai t Stat $(4,52) > t$ hitung $(3,182)$ juga dapat dimaknai bahwa variabel dependen berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan konstanta dan koefisien yang diperoleh, dapat disusun persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$IDM_n = 0,335 + 0,068(DD_{n-1}) \quad (3)$$

Persamaan di atas dapat dimaknai bahwa setiap pertambahan Rp1 triliun DD pada tahun berjalan akan menyebabkan estimasi peningkatan IDM sebesar 0,068 poin pada tahun berikutnya, yang kemudian dijumlahkan dengan konstanta intercept $(0,335)$ untuk mengetahui peningkatan IDM Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan.

Diskusi

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa penyaluran DD memiliki pengaruh terhadap peningkatan IDM Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 – 2023. Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang menyatakan terdapat hubungan dan pengaruh positif antara DD dengan peningkatan IDM (Dewi, 2021; Arina et al., 2021) ataupun pengaruh DD terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di desa secara umum (Fazri et al., 2022; Hartojo et al., 2022). Menurut hasil analisis, besaran jumlah DD yang dicairkan pada tahun berjalan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan IDM pada tahun berikutnya. Sesuai hasil perhitungan menggunakan persamaan yang didapatkan, penambahan Rp 1 triliun pada anggaran DD tahun 2023 atas realisasi tahun sebelumnya dapat diestimasi meningkatkan IDM Provinsi Jawa Barat menjadi 0,8195 yang masuk ke dalam kategori Mandiri yang sampai saat ini baru berhasil dicapai oleh Bali dan DI Yogyakarta.

Temuan ini juga memperkuat hasil-hasil penelitian lain yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pembangunan di daerah. Hal ini juga didorong oleh pemanfaatan DD, terutama pada tahun-tahun awal penerapannya, yang banyak dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, embung, dan sebagainya (Fazri et al., 2022). Secara empiris, pembangunan infrastruktur di perdesaan, terutama dalam bentuk jalan dan irigasi, diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan peningkatan produktivitas lahan dan penyerapan tenaga kerja (Ali & Pernia, 2003). Pembangunan infrastruktur menggunakan DD didorong untuk dilaksanakan secara PKTD dengan tujuan mengutamakan sumber daya tenaga kerja yang ada di desa. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui upah tunai langsung yang diberikan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Widyastuti & Nusantara (2022), yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak memiliki hubungan langsung terhadap pengentasan kemiskinan, akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang cepatlah yang dianggap berperan terhadap pengurangan kemiskinan yang ada.

Sebagaimana tujuannya, dana transfer ke daerah diharapkan dapat mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi yang mengarah pada tercapainya kesejahteraan. Penelitian Widyastuti & Nusantara (2022) menemukan bahwa tidak terbuktinya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada

beberapa wilayah di Indonesia dapat disebabkan oleh pola transfer yang dilakukan serta pola pengelolaan keuangan daerah, di mana proporsi belanja modal relatif kecil sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif tidak besar. Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa agar dana transfer yang diberikan pemerintah pusat dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, pengelolaannya harus diarahkan pada kegiatan-kegiatan produktif, misalnya melalui PKTD.

Kesimpulan

Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun Provinsi Jawa Barat ditemukan signifikan, di mana realisasi DD mampu menjelaskan sebesar 83% dari IDM Provinsi Jawa Barat. Artinya, semakin tinggi realisasi DD yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat, maka secara signifikan akan mampu memengaruhi peningkatan nilai IDM. Hal ini sejalan dengan tujuan dari DD yang diberikan untuk mendukung pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, dana transfer di Indonesia cenderung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah jika dikelola secara produktif, seperti dipergunakan untuk belanja modal. Oleh karena itu, agar pengaruh DD di Jawa Barat dapat lebih signifikan dalam meningkatkan perekonomian di desa, pemanfaatan DD harus diarahkan menjadi belanja yang produktif, di antaranya melalui PKTD. Penelitian selanjutnya mengenai tema desentralisasi fiskal ataupun dana desa dapat meninjau lebih lanjut bagaimana pengaruh pemanfaatan dana-dana Transfer ke Daerah terhadap kegiatan-kegiatan produktif maupun nonproduktif sehingga dapat diketahui bagaimana pengaruh dana tersebut berdasarkan jenis kegiatannya pada perkembangan perekonomian di daerah.

Referensi

- Ali, I., & Pernia, E. M. (2003). *Infrastructure and poverty reduction - What is the connection?* <http://www.adb.org/Economics/default.asp>
- Dewi, S. S. (2021). *Analisis dampak dana desa terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Klaten*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fazri, M., Risdawati, A., Paluseri, A., Oktarina, A., Imron, D. K., Nababan, F. E., Pertiwi, C., Rivera Roidatua, M., & Aryani, Y. (2022). Does village fund have an impact toward economic growth? *Economics Development Analysis Journal*, 11(4), 394-404. <https://doi.org/10.15294/edaj.v11i4.60240>
- Hartojo, N., Ikhsan, M., Dartanto, T., & Sumarto, S. (2022). A growing light in the lagging region in Indonesia: The impact of village fund on rural economic growth. *Economies*, 10(9), 217. <https://doi.org/10.3390/economies10090217>
- Arina, I.S.A., Masinambow, V., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22-41. <https://doi.org/10.35794/jpek.d.35490.22.3.2021>
- Kallert, A., Belina, B., Miessner, M., & Naumann, M. (2021). The cultural political economy of rural governance: Regional development in Hesse (Germany). *Journal of Rural Studies*, 87, 327–337. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.09.017>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Sistem informasi transfer ke daerah dan dana desa. <https://djpk.kemenkeu.go.id/simtrada/>

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2018). *Peringkat indeks desa membangun tahun 2018*
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2019). *Status indeks desa membangun provinsi, kabupaten, kecamatan tahun 2019*
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Peringkat indeks desa membangun (IDM) provinsi, kabupaten, kecamatan, desa tahun 2020*
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Peringkat indeks desa membangun tahun 2021*
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Peringkat nilai rata-rata indeks desa membangun tahun 2022*
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Peringkat indeks desa membangun tahun 2023*
- Nugroho, A., Fajri, Iqbal, R. M., Fadhiela, K., Apriyani, D., Ginting, L. N., & Nurdin, S. (2022). Impacts of village fund on post disaster economic recovery in rural Aceh Indonesia. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 70, 102768. <https://doi.org/10.1016/J.IJDRR.2021.102768>
- Nurhemi, & Suryani R, G. (2015). Dampak otonomi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 18(2), 183-206. <https://doi.org/10.21098/bemp.v18i2.522>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty – Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 81, 101493. <https://doi.org/10.1016/J.ASIECO.2022.101493>
- Swastyardi, D. (2008). *Regional inequality in Indonesia: Is the general allocation fund (DAU) likely to have an impact?* Institute of Social Studies.
- Widyastuti, A., & Nusantara, A. (2022). Economics development analysis journal does fiscal decentralization affect poverty? An empirical study article information. *Economics Development Analysis Journal*, 3. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa